

COLLABORATIVE PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA ULU MUSI TROKON DI CAWANG LAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Oleh:

Aditia Arjuansyah, Rosidin, Novliza Eka Patrisia

Email Korespondensi : aditiaarjuansyah01@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Ulu Musi Trokon di Cawang Lama. Desa wisata ini memanfaatkan potensi alam Sungai Musi yang sebelumnya merupakan tambang batu tradisional. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana kolaborasi ini dapat meningkatkan keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi desa. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan keterbatasan keterampilan dan pemahaman, kolaborasi ini berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pembangunan fasilitas wisata. Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat juga terbukti berperan penting dalam menjaga keberlanjutan fasilitas desa wisata. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya mempercepat pengelolaan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci untuk mempertahankan dan mengembangkan keberlanjutan desa wisata ini.

Kata Kunci : Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat, Pengelolaan Desa Wisata, Desa Wisata Ulu Musi Trokon

Abstract

This research examines the collaboration between the village government and the community in managing the Ulu Musi Trokon Tourism Village in Cawang Lama. This tourism village utilizes the natural potential of the Musi River which was previously a traditional stone quarry. This research aims to analyze how a collaborative process involving the village government and the community can improve the sustainability and economic empowerment of the village. Through a qualitative approach with interviews, observations, and documentation, the results showed that despite challenges such as limited skills and understanding, this collaboration successfully encouraged community participation in planning, organizing, and implementing the construction of tourist facilities. In addition, the synergy between the village government and the community also plays an important role in maintaining the sustainability and maintenance of tourism village facilities. This effective collaboration has improved the local economy and introduced the natural tourism potential of Ulu Musi Trokon Village to tourists, thus providing long-term benefits for community welfare.

Keywords: Village Government and Community Collaboration, Tourism Village Management, Ulu Musi Trokon Tourism Village

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan keindahan alam yang menakjubkan, keanekaragaman flora dan fauna, keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya dengan berbagai kearifan lokal. Setiap daerah memiliki keunggulannya masing-masing, termasuk potensi alamnya (Farida Nur Aini Rosidin, Susiyanto, 2025; Mafaza & Setyowati, 2020).

Dengan diberlakukannya Undang- Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah (Indrayani et al., 2024). Dengan adanya Undang-Undang tersebut pemerintah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan Objek Wisata (Husna et al., 2025).

Pariwisata sebagai suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai industri dan instansi terkait (Supriliyani,et al 2024). Mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor terpenting di Indonesia, maka pariwisata terbukti banyak memberikan kontribusi setelah minyak dan gas bumi sebagai penyumbang devisa terbesar (Safitri Vandayani & Widiyarta, 2022). , Maka pariwisata terbukti banyak memberikan kontribusi setelah minyak dan gas bumi sebagai penyumbang devisa terbesar (Safitri Vandayani & Widiyarta, 2022).

Pengelolaan desa wisata telah menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan perekonomian lokal di Indonesia (Anggraini, 2021; Wiwik Wulandari, 2024). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat lebih dari 1.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan potensi yang luar biasa untuk mendukung perekonomian desa dan daerah. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi wisata alam yang luar biasa yaitu Provinsi Bengkulu.

Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan luas area sebesar 19.788.70.Jumlah penduduk provinsi Bengkulu sebanyak 2.091.314 jiwa, dengan kepadatan 105 jiwa/km.

Tabel 1. 1
Jumlah Objek Wisata Alam di Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten/ Kota	Wisata Alam
1.	Kab. Bengkulu Selatan	27
2.	Kab. Bengkulu Tengah	46
3.	Kab. Bengkulu Utara	61
4.	Kab. Kaur	33
5.	Kab. Kepahiang	29
6.	Kab. Lebong	39
7.	Kab. Mukomuko	30
8.	Kab. Rejang Lebong	34
9.	Seluma	23
10.	Kota Bengkulu	12
Provinsi Bengkulu		334

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024

Dapat dilihat dari tabel jumlah objek wisata alam di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi wisata alam yang begitu banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi wisata yang didukung oleh kondisi alamnya. Banyak destinasi wisata daerah,

seperti wisata alam dan wisata khusus, yang belum ditata dan dikelola dengan baik salah satunya adalah objek wisata Ulu Musi yang terletak di Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang. Objek wisata Ulu Musi ini memanfaatkan aliran Sungai Musi (Raharja dkk, 2022). Tempat wisata Ulu Musi ini atau lebih dikenal dengan sebutan Trokon sudah dari dulu banyak dikunjungi oleh warga setempat maupun dari daerah lain. Melihat tempat tersebut bisa dikelola dan layak untuk dijadikan tempat rekreasi pada tahun 2020 rencana dibentuknya wisata titik nol muncul, sesuai dengan visi misi kepala desa Desa Cawang Lama yang ingin membangun wisata alam ini karena besarnya potensi yang dimiliki oleh objek wisata ulu musu yang tujuan utamanya untuk memajukan perekonomian Desa Cawang Lama, menarik tenaga kerja sebagai pengelola objek wisata dari warga desa. Dari statusnya hanya sekedar air yang mengalir menjadi tempat rekreasi.

Dalam pengelolaannya, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran yang sangat vital. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyediakan fasilitas dasar, serta memberikan dukungan teknis dan finansial untuk pengembangan desa wisata (Aryadi, 2023). Di sisi lain, masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, seperti pengelolaan sampah, pemeliharaan kebersihan lingkungan, hingga pelatihan

pemandu wisata local (Ibrahim et al., 2024; Kayati et al., 2025)

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih adanya ketimpangan dalam pengelolaan desa wisata antara pemerintah desa dan masyarakat, baik dari segi pemahaman, keterampilan, maupun sarana prasarana yang tersedia. Meskipun beberapa desa wisata telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak ekonomi yang positif, ada pula desa-desa yang kesulitan untuk mengoptimalkan potensi wisata mereka karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang efektif antara keduanya sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya pemahaman tentang pengelolaan wisata yang berkelanjutan (Kayati et al., 2025; Zaenuri & Fridayani, 2022).

Pada penelitian Khatimah & Zaenuri, (2018) menunjukkan bahwa kolaborasi akan berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang ikut terlibat didalamnya baik itu individu maupun organisasi dapat bekerja sama dengan baik dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Zaenuri & Fridayani, (2022) menunjukkan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat Pulesari sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam penelitian ini memfokuskan pada pengembangan wisata menggunakan Collaborative Governance, Collaborative Governance menurut Ansel and Gash adalah proses membuat suatu Keputusan dengan melibatkan Lembaga politik dan

pihak lainnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dengan kata lain Collaborative Governance berbicara mengenai kerja sama antara dua pihak atau lebih stakeholder untuk mengelola sumberdaya yang sama, namun dalam analisis terkait Collaborative Governance pada pengelolaan menggunakan George R. Terry dalam (Sukarna, 2011: 10).

Keterbaruan pengelolaan Desa Wisata Ulu Musi Trokon terletak pada pendekatan kolaboratif yang lebih terintegrasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selama ini, pengelolaan desa wisata sering melibatkan masyarakat hanya sebagai penerima manfaat, namun dalam model ini, masyarakat juga berperan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelestarian budaya serta alam desa. Selain itu, keterbaruan lainnya adalah sinergi yang lebih baik antara kedua pihak dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan wisata. Dengan mengedepankan prinsip pengelolaan berkelanjutan, model ini mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pengelolaan dan pemasaran desa wisata.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengelolaan desa wisata di Ulu Musi Trokon, Cawang Lama, dengan informan Kepala Desa dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif. Proses analisis melibatkan tiga tahap: reduksi data, penyajian

data dalam bentuk yang mudah dipahami, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan untuk memastikan keakuratan informasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kolaborasi melibatkan proses interaksi yang menghadirkan beragam pemangku kepentingan untuk mengatasi persoalan bersama. Solusi dicapai dengan memadukan gagasan dari setiap pihak yang berperan dalam kerjasama ini, menciptakan saling ketergantungan antar pelaku yang signifikan (Padilah, 2022). Tiga aspek fundamental dalam kerjasama mencakup: pembagian tugas spesifik untuk masing-masing pihak, struktur kelembagaan yang jelas, dan penerapan koordinasi melalui sistem interaksi operasional (Kamil, 2023). Dalam konteks pengelolaan desa wisata, pola kerjasama semacam ini dapat diamati melalui model tata kelola kolaboratif.

Collaborative governance merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara government, civil society, dan private sector dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianisme dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan society (Darmi, 2016; Triyanto et al., 2021; Wisnumurti et al., 2022).

George R. Terry (2012:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Tahapan dari pengelolaan terdiri dari beberapa rangkaian tahap (Sujatmiko et al., 2023).

Pengelolaan pariwisata perlu diperhatikan dengan baik seperti terkait pada adat istiadat atau budaya masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata (Wisnumurti et al., 2022). Pengelolaan pariwisata harus berpedoman dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunikasi dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas local (Aryanto & Widayat, 2025).

Dalam kolaboratif pemerintah desa dan masarakat melakukan pengelolaan sebuah objek wisata dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan tertentu melalui beberapa tahap yaitu:

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah bagian hal yang sangat penting bagi organisasi untuk menetapkan tujuan organisasi dan cara untuk dapat mencapai tujuan. Perencanaan menjadi acuan yang penting bagi organisasi untuk melaksanakan perencanaan dalam pengelolaan objek wisata ulu musi. Perencanaan merupakan suatu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pada masa depan dalam mencitrakan serta mendeskripsi kegiatan akan dijakankan. (Rohman, 2017).

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dilakukan dengan mencapai tujuan. Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan dan pembagian kegiatan dan pekerjaan berdasarkan tujuan yang diharapkan organisasi (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022; Cahyani, 2024).

Pelaksanaan (*Actuating*)

Commanding adalah seorang pimpinan dalam sebuah organisasi harus memiliki kemampuan dalam memotivasi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan perintah kepada bawahannya. (Dunie, 2018).

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang mengontrol dan dilakukan penilaian terhadap suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif (Semedi, 2013). Karena setiap organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberadaan desa wisata didorong oleh motivasi dan potensi pengembangan pariwisata yang ada di dalamnya (Budi Setiawati & Suparti, 2024). Untuk dapat dikategorikan sebagai desa wisata, suatu desa harus memenuhi beberapa persyaratan penting yang telah diidentifikasi oleh (Bela & Utama, 2022).

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pengelolaan desa wisata di Ulu Musi Trokon dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan fokus pada potensi alam, terutama Sungai Musi, yang menjadi

daya tarik wisata utama. Proses perencanaan dimulai dengan diskusi bersama masyarakat untuk menentukan kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan, seperti tempat istirahat, jembatan penghubung, dan area parkir yang memadai. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dana, informasi, dan arahan teknis, sementara masyarakat memberikan masukan tentang kebutuhan mereka serta ide kreatif berbasis kearifan lokal.

Meskipun awalnya ada kesulitan dalam hal pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat, antusiasme masyarakat terhadap rencana pembangunan fasilitas semakin meningkat. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa meskipun ada keterbatasan dalam memahami aspek teknis, mereka merasa dilibatkan dalam perencanaan dan bangga dapat berperan dalam merancang masa depan desa mereka. Pemerintah desa terus melakukan sosialisasi untuk menjelaskan perencanaan desa wisata, dan meskipun tantangan komunikasi masih ada, masyarakat semakin terbuka dan mendukung upaya pengelolaan desa wisata ini.

Keberhasilan perencanaan ini tercermin dari peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat pengelolaan desa wisata, baik dari segi ekonomi maupun kualitas hidup. Masyarakat yang sebelumnya kurang tertarik kini semakin menyadari pentingnya peran mereka, dan mereka merasa bangga berpartisipasi dalam perencanaan. Kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah desa dan masyarakat juga memberikan dampak positif bagi perekonomian

lokal dan kesejahteraan desa. Dengan terbangunnya rasa memiliki dan komitmen terhadap pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan wisata ini dapat terus berkembang, memberikan manfaat jangka panjang bagi desa dan masyarakat.

Perencanaan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Ulu Musi Desa Cawang Lama

Tujuan/Visi Pokdarwis Ulu Musi Cawang Lama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di Desa Cawang Lama.
- b. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Desa Cawang Lama, dan memberikan manfaatnya pembangunan Desa maupun kesejahteraan masyarakat Desa Cawang Lama.
- c. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Desa Cawang Lama.

Visi Pokdarwis Ulu Musi Desa Cawang Lama:

- a. Pariwisata Desa Cawang Lama dikenal oleh masyarakat luas.
- b. Bekerjasama dengan

Pokdarwis desa wisata lain untuk membuat paket wisata. Melestarikan Budaya masyarakat Desa Cawang Lama.

Umpan Balik Pengunjung

Umpan Balik Pengunjung Objek Wisata Ulu Musi yaitu Fasilitas yang ada pada objek wisata ulu musu ini cukup lengkap tetapi wisatawan berharap adanya penambahan atraksi wisata.

Analisis potensi keberlanjutan

Memiliki daya tarik yang luar biasa untuk dikembangkan, mulai dari aliran air yang tidak terlalu deras dan bersih sehingga para pengunjung dapat menikmati aliran air dengan berenang atau sekedar bermain air kemudian pembangunan daya tarik pendukung seperti pondok-pondok tempat pengunjung bersantai serta fasilitas yang lengkap dan cukup terawat seperti kamar ganti, wc, musholla dan lainnya.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam pengelolaan desa wisata merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan memiliki peran yang jelas dan tugas yang terstruktur. Di Desa Wisata Ulu Musi Trokon, pengorganisasian dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat, yang memungkinkan kedua pihak bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan desa wisata.

Pengorganisasian dalam pengelola Pengorganisasian di Desa Wisata Cawang Lama menghadapi tantangan terkait keterampilan

masyarakat, namun perkembangan positif terlihat dengan terbentuknya POKDARWIS yang sudah berjalan baik. Masyarakat mulai bersedia belajar dan bekerja sama dalam pengelolaan, terutama dalam menjaga kebersihan dan merawat fasilitas. Pembagian tugas yang jelas membuat pekerjaan lebih efisien dan memotivasi masyarakat untuk terlibat lebih aktif. Kolaborasi antara masyarakat dan perangkat desa memperlancar pengorganisasian, menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian desa wisata.

Kelompok pemandu wisata juga berperan penting dalam memastikan kelancaran pengalaman wisatawan. Meskipun tantangan dalam keterampilan dan pelatihan masih ada, pengorganisasian yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat, serta semangat tinggi untuk menjaga fasilitas, meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata. Kolaborasi ini memberikan dampak positif bagi keberlanjutan desa wisata dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Pengorganisasian yang terus diperbaiki akan memperkuat keberlanjutan desa wisata di masa depan.

Unit Pegelola

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cawang Lama, Kabupaten Rejang Lebong, dengan melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai sasaran utama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kewenangan secara langsung kepada Pokdarwis dalam pelaksanaan dan pengelolaan destinasi wisata desa. Setelah

penetapan kewenangan, masing-masing pengurus Pokdarwis menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan komitmen penuh sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan. Pengelolaan Pokdarwis dilaksanakan di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota pengurus lainnya, guna memastikan pengelolaan yang terorganisir dan berkelanjutan di Desa Cawang Lama.

Pembagian Tugas dan wewenang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Cawang Lama, Kabupaten Rejang Lebong, dengan lokasi pelaksanaan di Kantor Desa Cawang Lama. Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan setiap pengelola agar mampu melaksanakan kegiatan kelompoknya secara optimal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa para pengelola telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi masing-masing, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan sektor wisata desa secara efektif.

Fasilitas

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pokdarwis dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lokasi pelaksanaan di objek wisata Ulu Musi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeliharaan terhadap Ulu Musi sebagai salah satu aset wisata desa. Hasil dari kegiatan ini mencakup pemeliharaan kawasan Ulu Musi, perawatan lingkungan sekitar, serta pembangunan fasilitas

yang dibutuhkan guna mendukung kenyamanan dan keberlanjutan objek wisata Ulu Musi sebagai destinasi unggulan desa.

Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan pengelolaan desa wisata di Cawang Lama melibatkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok pendukung seperti pemandu wisata. Meskipun ada tantangan, semangat kolektif masyarakat terlihat dalam kegiatan gotong royong untuk memperbaiki fasilitas, yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap desa wisata. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, memberikan arahan teknis dan dukungan dalam perencanaan, sementara masyarakat aktif berpartisipasi dalam perawatan fasilitas dan kebersihan, meskipun keterampilan teknis masih terbatas.

Kelompok pendukung seperti pemandu wisata memainkan peran penting dalam memastikan pengalaman wisatawan berjalan lancar. Pendekatan kolaboratif antara masyarakat dan perangkat desa semakin memperkuat pengelolaan desa wisata dengan pembagian tugas yang jelas dan terstruktur. Semangat ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama di kalangan masyarakat, yang semakin menyadari pentingnya pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan ini bergantung pada sinergi antara semua pihak, dengan peningkatan pelatihan dan pemberdayaan yang terus dilakukan. Masyarakat merasa diberdayakan dan memiliki rasa bangga terhadap kontribusi mereka dalam pengelolaan desa wisata.

Kolaborasi yang baik ini memberikan dampak positif, tidak hanya pada kualitas pengelolaan desa wisata tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, serta kelestarian desa wisata itu sendiri. Pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dilihat kolaborasi identifikasi area, kemudian penilaian dampak lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal, dan keamanan pengunjung yang berwisata.

Identifikasi Area

Objek wisata Ulu Musi di Desa Cawang Lama sangat mudah dijangkau oleh wisatawan karena didukung oleh infrastruktur jalan yang sudah baik serta adanya penunjuk arah yang memudahkan akses menuju lokasi. Kemudahan ini merupakan sudah baik serta adanya penunjuk arah yang memudahkan akses menuju lokasi. Kemudahan ini merupakan hasil dari kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun dan meningkatkan sarana prasarana penunjang wisata. Peran aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas, serta dukungan pemerintah desa dalam perencanaan dan penyediaan anggaran, menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan wisata yang ramah dan nyaman bagi pengunjung.

Penilaian Dampak Lingkungan

Objek Wisata Ulu Musi memiliki potensi wisata yang sangat besar dan terus berkembang, namun pengelolaannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan alam. Dampak ekonomi dari keberadaan objek wisata ini sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Cawang

Lama, khususnya para pelaku usaha UMKM dan pemilik warung di sepanjang jalan menuju lokasi. Manfaat ekonomi ini merupakan hasil dari pengelolaan yang melibatkan peran aktif masyarakat, serta dukungan pemerintah desa dalam menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan lokal.

Pemberdayaan Komunitas Lokal

Bekerjasama dengan komunitas pecinta alam (MAPASTA) Rejang Lebong untuk pengadaan *glamping*, kemudian rencana pengadaan *river tubing* akan dilaksanakan bekerjasama dengan komunitas river tubing curup. Penjualan hasil UMKM di area objek wisata ulu musu.

Keamanan Pengunjung

Keamanan pengunjung terjamin mulai dari parkir yang terpantau petugas objek wisata ulu musu, pengadaan tali pembatas di area aliran sungai yang dalam, pengadaan tanda arah jalur evakuasi untuk pengunjung yang dalam keadaan darurat.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*controlling*) memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap aktivitas yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Cawang Lama, pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, melibatkan perangkat desa, kelompok kerja, serta masyarakat. Hal ini memungkinkan terciptanya pengelolaan yang lebih transparan, efektif, dan bertanggung

jawab.

Pengawasan di Desa Wisata Cawang Lama melibatkan pemantauan kinerja serta umpan balik konstruktif dari berbagai pihak. Meskipun menjadi tantangan, kemajuan positif terlihat dari peningkatan pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam pengawasan, terutama dalam menjaga kebersihan dan merawat fasilitas. Evaluasi rutin dan umpan balik dari masyarakat membantu memperbaiki pengelolaan desa wisata.

Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, dengan beberapa anggota mengingatkan pengunjung untuk menjaga kebersihan. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara top-down, tetapi juga melibatkan partisipasi horizontal, menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Pemanfaatan teknologi, seperti grup WhatsApp, mempermudah komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat.

Keberhasilan pengawasan juga didorong oleh pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya sebagai objek pengawasan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak memberi masukan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan pemahaman yang baik, masyarakat merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan desa wisata. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata yang efektif membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Pengawasan dilakukan sebagai bentuk masukan untuk hal hal baru kedepan nya baik strategi yang digunakan, kemudian pemeliharaan infrastruktur dan keamanan, sert

apengawasan pada pengelolaan keuangan.

Strategi Pengembangan Objek Wisata

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BUMDes Arma Jaya di Desa Cawang Lama, Kabupaten Rejang Lebong, dengan sasaran pengelola Pokdarwis Darmo Jaya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberdayakan pengelola agar menjalankan tugas sesuai tupoksi. Rencana pengembangan dan administrasi objek wisata Ulu Musi akan dimulai pada tahun 2024. Oleh karena itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap program berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata.

Pemeliharaan Infrastruktur dan Keamanan

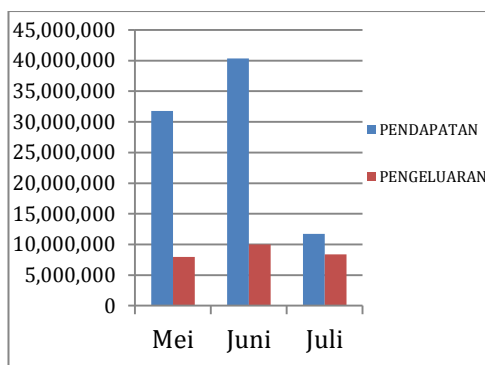
Pemeliharaan infrastruktur dan keamanan objek wisata Ulu Musi terus dilakukan sejak tahun 2022 hingga 2023, dengan berbagai pengembangan fasilitas seperti perluasan lahan parkir, pembangunan toilet, kamar ganti, penambahan pondok, serta peninggian jembatan sebagai langkah antisipasi banjir. Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan tersebut, pengawasan rutin sangat diperlukan guna menjamin bahwa setiap fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi, aman digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Pengelolaan anggaran Keuangan

Pengelolaan anggaran keuangan untuk pengembangan dan pembangunan objek wisata Ulu Musi dilakukan berdasarkan rencana yang

telah disusun, dengan sumber dana utama berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara itu, biaya untuk pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas yang sudah tersedia berasal dari pemasukan objek wisata Ulu Musi. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan

Pengawasan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Ulu Musi Trokon di Cawang Lama, Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dalam pengawasan laporan keuangan, sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan transaksi keuangan tercatat dengan jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait, sekaligus mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan pembangunan desa wisata.



Gambar 1 Grafik Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan

Laporan keuangan yang tercatat dalam gambar menunjukkan

data pendapatan dan pengeluaran Desa Wisata Ulu Musi Trokon pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Pendapatan tertinggi tercatat pada bulan Juni sebesar 40.335.000, sementara yang terendah pada bulan Juli sebesar 11.728.000. Pengeluaran juga mengalami fluktuasi, dengan pengeluaran tertinggi pada bulan Juni sebesar 10.003.000, diikuti oleh pengeluaran pada bulan Juli sebesar 8.376.000, dan yang terendah pada bulan Mei sebesar 7.947.000.

Dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Ulu Musi Trokon, kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk mengelola sumber daya keuangan yang berasal dari sektor pariwisata. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata, seperti yang tercatat pada bulan Juni, bisa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang mendukung keberlanjutan destinasi wisata. Selain itu, pengeluaran yang terkontrol juga perlu diperhatikan agar dana yang ada digunakan secara efisien untuk kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Melalui pendekatan kolaboratif, baik pemerintah desa maupun masyarakat dapat bekerja sama untuk merumuskan kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa yang berbasis pada kebutuhan bersama. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sangat penting agar semua pihak merasa memiliki dan turut berkontribusi dalam pengembangan desa wisata tersebut. Dengan cara ini, pengelolaan Desa Wisata Ulu Musi Trokon diharapkan dapat

berlanjut dengan sukses, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah setempat.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kolaboratif Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Ulu Musi Trokon di Cawang Lama menunjukkan perkembangan positif yang didorong oleh kerja sama efektif antara kedua pihak. Dari empat aspek yang diteliti, dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses perencanaan dilakukan secara kolaboratif, dengan pemerintah desa dan masyarakat bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa wisata. Meskipun ada tantangan dalam pemahaman awal, antusiasme masyarakat terhadap pengembangan fasilitas menunjukkan keberhasilan perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif.

Pengorganisasian berjalan dengan baik meskipun ada keterbatasan keterampilan masyarakat. Pembentukan POKDARWIS dan pembagian tugas yang jelas memperkuat efisiensi pengelolaan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap desa wisata. Kolaborasi antara masyarakat dan perangkat desa menjadi kunci keberhasilan pengorganisasian.

Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat dan kelompok pendukung seperti pemandu wisata, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam gotong royong dan pemeliharaan fasilitas memperlihatkan semangat

kolektif untuk menjaga kelestarian desa wisata, meskipun pelatihan lebih lanjut masih diperlukan.

Pengawasan dalam pengelolaan desa wisata melibatkan umpan balik konstruktif dari masyarakat yang semakin memahami peran mereka dalam menjaga fasilitas dan kebersihan. Penggunaan teknologi seperti grup WhatsApp mempermudah koordinasi dan transparansi dalam pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan tidak hanya bergantung pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab bersama.

Rekomendasi/Saran

1. **Peningkatan Pelatihan untuk Masyarakat:** Disarankan untuk memberikan pelatihan teknis secara berkala kepada masyarakat terkait pengelolaan desa wisata, perawatan fasilitas, dan pemasaran, agar mereka dapat mengelola desa wisata dengan lebih mandiri dan efisien.
2. **Optimalisasi Penggunaan Teknologi:** Disarankan untuk memperluas penggunaan teknologi, seperti aplikasi atau platform manajemen, yang dapat mempermudah komunikasi, pengawasan, dan koordinasi antar pihak terkait dalam pengelolaan desa wisata.
3. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:** Disarankan untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat yang lebih terstruktur, seperti aplikasi pelaporan kerusakan dan masalah

di desa wisata, untuk memastikan keberlanjutan dan kelestarian fasilitas wisata.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Rohman. (2017). *Dasar - Dasar Manajemen*. Malang, Indonesia: Inteligencia Media, Malang, Indonesia.

Jurnal :

Aliefiani Mulya Putri, G., Putri Maharani, S., & Nisrina, G. (2022). Literature View Pengorganisasian: Sdm, Tujuan Organisasi Dan Struktur Organisasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3), 286–299. <https://doi.org/10.31933/Jemsi.V3i3.819>

Anggraini, R. (2021). Peran Pengelola Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah Saat Pandemi Covid-19 Studi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Ukm Kabupaten Mukomuko. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 52–65.

Arif Kurniawan, I., Widianingsih, I., Ningrum Wiradinata, S., & Jaja Raharja, S. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2021(September), 105–113. <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/41883>

Aryadi, R. D. (2023). Analisis

Pengembangan Desa Wisata Sebagai Best Practice Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Dan Collaborative Governance. In *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* (Vol. 7, Issue 10, Pp. 17901–17915). Pdfs.Semanticscholar.Org. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V8i7.13213>

Aryanto, S. D., & Widayat, T. N. E. (2025). Kolaborasi Media Sosial Dalam Mendukung Keberhasilan Desa Wisata Studi Kasus Desa Wisata Nglanggeran Kapanewon Patuk *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan Ips*. <https://www.jurnalp4i.com/index.php/social/article/view/5730>

Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pembangunan Pariwisata Alam Di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4). <https://doi.org/10.36982/jpg.V7i4.2461>

Budi Setiawati, & Suparti, H. (2024). Kapabilitas Pemerintahan Desa Dalam Collaborative Governance. *Pubbis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(1), 39–49. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.V8i1.948>

Cahyani, R. (2024). Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik

- Perkebunan Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 6(1), 50–57.
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. *Jurusan Administrasi Fisip Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 4(2), 87–156.
- Dunie, W. (2018). Pengaruh Pengarahan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Telkom Belitang Oku Timur. *Jurnal Aktual*, 16(2), 107.
<https://doi.org/10.47232/Aktual.V16i2.25>
- Farida Nur Aini Rosidin, Susiyanto, S. I. (2025). Penerapan Kolaborasi Antara Pemerintah Desa, Masyarakat Dan Akademisi Dalam Penguatan Kelembagaan Dan Penanaman Pohon. *Jurnal Abdimas Serawai*, 5(Penguatan Kelembagaan Dan Penanaman Pohon), 48–62.
- Husna, N. U., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2025). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)*, 9(1), 63–76.
<https://doi.org/10.31506/Jipags.V9i1.29954>
- Ibrahim, A. H. H., Madjid, S., & Hafel, M. (2024). Tinjauan Kolaboratif Dalam Mendorong Pengembangan Desa Wisata Lapasi Di Maluku Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 15.
<https://doi.org/10.47134/Villages.V5i2.109>
- Indrayani, I. A. D., Prabawati, N. P. A., & Yudhartha, I. P. D. (2024). Collaborative Governance Berbasis Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Desa Wisata Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar). *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 2(1).
<https://doi.org/10.61292/Eljbn.151>
- Kayati, I. T., Indarti, S., & Adriadi, R. (2025). Analisis Penerapan E-Government Pada Penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bengkulu. 5.
- Khatimah, K., & Zaenuri, M. (2018). Kolaborasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dala Pengelolaan Desa Wisata Pulesari Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. 03(1), 91–99.
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7.
<https://doi.org/10.31258/Jkp.11.1.P.7-12>
- Maharani, T., Anggraini, S. D., & Kamil, M. (2023). Collaborative Governance Dalam

- Pengembangan Kawasan Wisata Ghanjaran Desa Ketanpanrame Trawas Kabupaten Mojokerto. *Village: Journal Rural Development And Goverment Studies*, 2(2), 49–55. [Http://Journal.Umpo.Ac.Id/Index.php/Village/Article/View/10111](http://Journal.Umpo.Ac.Id/Index.php/Village/Article/View/10111)
- Ni Made Angeliana Suwantara Putri, Putu Eka Purnamaningsih, & Ni Wayan Supriliyani. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Business And Investment Review*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.61292/Birev.92>
- Padilah, D. R. (2022). Kolaborasi Antar Institusi Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya (Studi Tentang Wisata Leuwi Eretan). In *E-Jurnal Inskripsi Unigversitas Galuh* (Vol. 2, Issue 2). Repository.Unigal.Ac.Id. [Http://Repository.Unigal.Ac.Id/Handle/123456789/2251](http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/2251)
- Rohman. (2017). *Dasar - Dasar Manajemen*. Inteligensia Media, Malang, Indonesia.
- Safitri Vandayani, D., & Widiyarta, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata Di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. In *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* (Vol. 5, Issue 1). Igovjournal.Org. <https://doi.org/10.24905/Igj.V5i1.64>
- Semedi, B. (2013). Pengawasan Kepabeanan. *Pusdiklat Bea Cukai*, 1–11.
- Sujatmiko, S., Orbawati, E. B., -, F., & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/Jpg.V8i1.2528>
- Triyanto, D., Purnawan, H., & Saputra, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. In *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* (Vol. 7, Issue 1, Pp. 1–6). Academia.Edu. <https://doi.org/10.33084/Restorica.V7i1.1922>
- Wisnumurti, A. A. G. O., Antarini, L., Mardika, I. M., & Dewi, I. G. A. A. Y. (2022). Pelatihan Dan Pendampingan Tata Kelola Pengembangan Desa Wisata Kepada Perangkat Desa Dan Pokdarwis. *International Journal Of Community Service Learning*, 6(3), 293–298. <https://doi.org/10.23887/Ijcs.V6i3.51586>
- Wiwik Wulandari, R. R. (2024). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Pt. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Upt Kota Bengkulu.

*Jurnal Manajemen Dan Ilmu
Administrasi Publik (Jmiap),
6(1), 77–85.*

Zaenuri, M., & Fridayani, H. D.
(2022). *Kolaborasi Masyarakat
Dan Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Desa Wisata
Pulesari Di Desa Wonokerto
Kecamatan Turi Kabupaten
Sleman.*